



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SYARIHUL HASANAH  
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN  
3. NHK : 686334

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **167.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/78 m2 di KAB / KOTA SUMBA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000  
2. Tanah Seluas 549 m2 di KAB / KOTA SUMBA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000  
3. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **64.000.000**

1. MOTOR, VIAR SOOTER Tahun 1917, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000  
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000  
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000  
4. MOTOR, HONDA H1B02N42LO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000  
5. MOTOR, HONDA H1B02N41LI Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **9.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **20.000.000**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **50.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 310.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 310.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.